

ABSTRAK

Pembaharuan pada sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan upaya dalam membentuk tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Pada penyelenggaraan pemerintahan, pegawai negeri sipil merupakan aktor utama yang memiliki peran strategis dalam menjalankan serta mensukseskan pelaksanaan pemerintahan dan pemberian pelayanan publik. Munculnya tindakan korupsi dalam beberapa waktu ini lebih banyak didominasi oleh pejabat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang didasari tindakan penyalahgunaan wewenang, melainkan sudah menjadi hal yang biasa ketika pejabat pemerintah diduga ataupun telah terbukti melakukan korupsi.

Seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pekalongan yakni tindak pidana korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton. Selain sanksi pidana, sanksi disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu diterapkan dan ditegakkan dalam kasus ini sebagai akibat pelanggaran disiplin. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang menitikberatkan kepada penerapan sanksi disiplin pada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus korupsi dengan judul "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN PEKALONGAN (STUDI KASUS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ALKES RSUD KRATON). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum dan teori *good governance* untuk menguraikannya.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin melalui serangkaian proses yaitu pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan penyampaian penjatuhan hukuman. Pada kasus korupsi alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, penjatuhan hukuman disiplinnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam prosesnya terdapat faktor yang menjadi pengaruh dan hambatan penjatuhan hukuman disiplin berupa faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor kultur/budaya. Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan cara pemerintah dalam menciptakan *good governance*. Dari permasalahan yang terjadi di pemerintahan saat ini mengharuskan pemerintah untuk membuat perubahan melalui reformasi birokrasi agar dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Disiplin Pegawai, Korupsi, *Good Governance*

ABSTRACT

The renewal of the government system carried out by the government at this time is an effort to establish good governance by realizing clean governance, free from corruption, collusion and nepotism. In government administration, civil servants are the main actors who have a strategic role in carrying out and succeeding the implementation of government and providing public services. The emergence of acts of corruption in recent times is dominated by government officials both at the center and in the regions based on acts of abuse of authority, but it has become commonplace when government officials alleged or have been proven to commit corruption.

Such as corruption cases carried out by Civil Servants in Pekalongan Regency namely corruption of medical devices in the Kraton Regional General Hospital. In addition to criminal sanctions, disciplinary sanctions as Civil Servants need to be applied and enforced in this case as a result of disciplinary violations. Based on the background of these problems, the authors conducted a study that focused on the application of disciplinary sanctions to Civil Servants involved in corruption cases entitled "THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PROVEN CIVIL SERVANTS TO DO CRIMINAL CRIMINAL ACTIONS TO REALIZE GOOD GOVERNANCE IN PEKALONGAN DISTRICT (CASE STUDY IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON CRIMINAL ACTION CRIMINAL ACTORS OF KRATON HOSPITALS. This study uses a descriptive qualitative research method using a normative juridical approach. Using law enforcement theory, legal effectiveness theory and good governance theory to describe it.

Based on the research it can be concluded that the imposition of disciplinary penalties for Civil Servants who commit disciplinary violations through a series of processes namely calling, examination, sentencing, and submission of sentences. In the case of corruption in the health equipment of the Regional General Hospital of the Pekalongan Regency Kraton, the imposition of disciplinary sentences was in the form of a dishonorable discharge. In the process there are factors that become influences and barriers to imposing disciplinary penalties in the form of legal substance, legal structure factors and cultural / cultural factors. The imposition of disciplinary penalties on civil servants who are proven to have committed violations is the way the government creates good governance. From the problems that occur in the current government requires the government to make changes through bureaucratic reform in order to create good governance

Keywords: Employee Discipline, Corruption, Good Governance